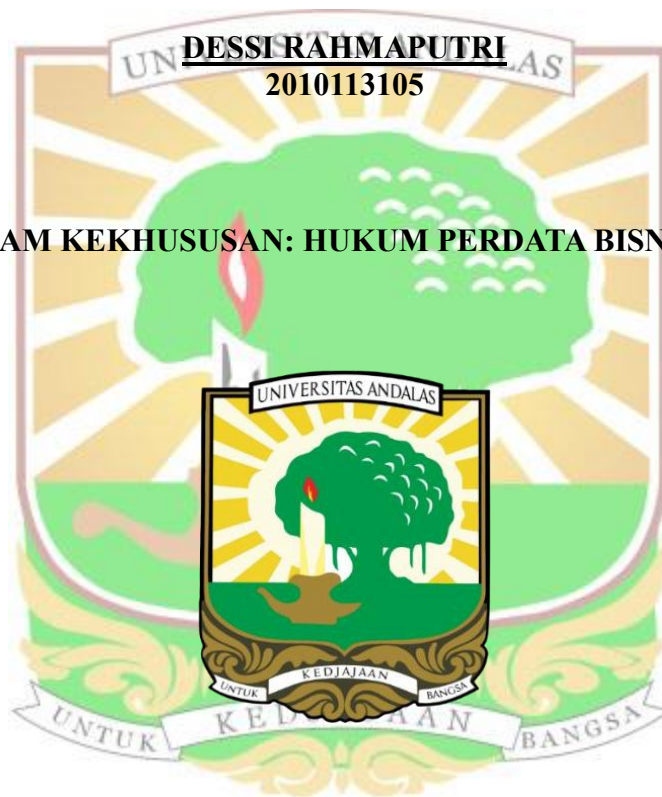


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
MINORITAS PADA PT. FORZA LAND INDONESIA TBK YANG
DINYATAKAN PAILIT**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

DESSI RAHMAPUTRI
2010113105

Pembimbing:

Zahara, S.H., M.H.
Shafira Hijriya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 29/PK-II/I/2025

ABSTRAK

Pailitnya suatu perusahaan dalam dunia usaha dewasa ini sudah tergolong merupakan suatu peristiwa yang lumrah dan sering terjadi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku di Indonesia sampai saat ini memberikan suatu alternatif bagi para kreditor untuk mengajukan permohonan pailit atas suatu perusahaan yang menjadi debitornya. Apabila suatu emiten mengalami pailit, maka terdapat pihak yang sangat dirugikan atas kondisi tersebut, yaitu para investor publik. Investor publik menjadi pihak yang sangat dirugikan karena dengan pailitnya suatu perusahaan terbuka tempatnya berinvestasi maka para investor publik tersebut tidak dapat menjual saham-saham yang dimilikinya lagi di dalam emiten tersebut. Oleh karena itulah maka investor publik berada di urutan paling akhir setelah kreditor konkuren di dalam pembagian harta pailit. Dan seringkali yang terjadi dalam prakteknya, investor publik tidak mendapatkan sisa dari pembagian harta yang ada karena telah habis dibagikan pada para kreditor dan biaya lainnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kedudukan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Forza Land Indonesia Tbk yang pailit ditinjau dari hukum kepailitan dan (2) Bagaimana akibat hukum kepailitan perusahaan terbuka terhadap kepemilikan saham oleh pemegang saham minoritas. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yang kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses *editing* serta analisis data kualitatif yang memberikan gambaran secara deskriptif dengan menggunakan kalimat atas temuan yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan-perundang-undangan, serta bahan hukum yang memberikan gambaran detail khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap investor atas pailitnya suatu perusahaan terbuka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Kedudukan para pemegang saham publik pada PT. Forza Land Indonesia merupakan kreditor yang termasuk dalam kreditor bersaing (konkuren) dan bentuk perlindungan hukum bagi investor publik pada PT. Foza Land Indonesia menurut Pasal 111 UUPM memberikan kesempatan kepada investor untuk mendapat ganti rugi apabila pada proses kepailitan emiten terdapat kecurangan-kecurangan. 2) akibat hukum kepailitan perusahaan terbuka terhadap kepemilikan saham oleh investor publik menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, ia tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila perusahaan dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Kepailitan.